



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK BAKAL PERIKSA NUSRON WAHID

JAKARTA | **Harian Merdeka** — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Halaman 11

NASIONAL

Dirjenpas Mashudi
Mundur Buntut
Insiden Lapas Kelas
IIA Cibinong

Halaman 2

KIPRAH POLISI

Aksi FSPMI di Banten
Berjalan Kondusif,
Kapolresta Serang
Kawal Pengamanan
Humani

Halaman 7

BOLA

Indonesia ke Final,
Diks: Laga Gila!

Halaman 12

Pimpin BRAN, Aktivis Ingatkan Komjen Dedi Utamakan Petani dan Nelayan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan ini menandai langkah awal operasionalisasi lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengurai benang kusut ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di tanah air.

Pengangkatan Dedi Prasetyo didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Bersamaan dengan itu, Kepala Negara turut melantik sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kehadiran BRAN sebagai lembaga baru langsung mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk dari Gerbang Tani

Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menyatakan bahwa pihaknya menghormati penuh kewenangan prerogatif Presiden dalam mengangkat Kepala BRAN yang pertama. Menurutnya, penunjukan figur dengan latar belakang kepolisian berpangkat komisaris jenderal ini dibaca sebagai sinyal kuat agar lembaga tersebut dapat segera bekerja tanpa penundaan pasca-pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UUPRA). “Bagi kami, yang lebih menentukan bukan latar belakang pejabatnya, melainkan kesungguhan lembaga ini menjalankan mandat reforma agraria. BRAN lahir untuk memutus ego sektoral yang selama puluhan tahun membuat penyelesaian ketimpangan dan konflik agraria jalan di tempat,” ujar Idham Arsyad melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat (2/10/2026). ● (Egi)



Dirjenpas Mashudi Mundur Buntut Insiden Lapas Kelas IIA Cibinong

JAKARTA |
Harian Merdeka

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Akbar Hadi, mengatakan surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus

Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.

“Hari ini Bapak Menteri Imipias telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Akbar dalam keterangan resmi. Pengunduran diri itu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.

Akbar memastikan pengunduran diri Mashudi tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

Kemenimipas, khususnya di bidang pemasyarakatan.

“Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Kemenimipas juga memastikan layanan dan pelaksanaan tugas organisasi tetap menjadi prioritas selama proses administrasi pengunduran diri berlangsung. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Dialog dengan KSPSI, Menaker Pastikan RUU Ketenagakerjaan Adil Bagi Semua

Dialog dengan KSPSI, Menaker Pastikan RUU Ketenagakerjaan Adil Bagi Semua

Bekasi | Harian Merdeka — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah bersama DPR dipastikan mengakomodasi aspirasi para pekerja dan buruh.

Dalam dialog Sosial Mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Adil Bagi Semua yang diselenggarakan KSPSI dan diikuti 15 Pimpinan dan perwakilan Federasi Serikat KSPSI Moh Jumhur Hidayat, di Gedung BBPVP Bekasi, Kamis (1/10/2026), Menaker Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) DPR terus menyerap serta menyelaraskan berbagai masukan dari elemen buruh demi menghadirkan payung hukum yang adil dan komprehensif.

"Insya Allah undang-undang yang akan kita miliki ini adalah yang terbaik buat kita. Tugas kami, pemerintah dan DPR melalui tim Panja, merumuskan dan menyelaraskan semua aspirasi yang masuk," ujar Yassierli.

Menaker menjelaskan, cakupan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal tersebut mencakup penyiapan angkatan kerja dan pelatihan kompetensi guna menghadapi perubahan dunia kerja, kewajiban pemerintah menyediakan pasar kerja, hingga perbaikan proses rekrutmen dan pemagangan.

Selain itu, RUU ini juga mengatur perlindungan hak pekerja selama masa aktif bekerja—termasuk isu pengupahan—serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar lebih efektif, salah satunya melalui wacana penarikan fungsi pengawasan ke

tingkat pusat. Perlindungan bagi pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga turut masuk dalam pembahasan.

Yassierli menegaskan menegaskan komitmen pemerintah dan legislatif untuk mengakomodasi berbagai aspirasi pekerja/buruh dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia memastikan seluruh proses penyusunan aturan ini dilakukan secara transparan tanpa adanya titipan kepentingan tertentu.

"Kami dari Kemnaker memastikan tidak 'masuk angin' dalam penyelesaian atau penyusunan

rumusan ini. Tidak ada titipan pasal. Kami ingin memberikan yang terbaik buat bangsa ini," ujar Yassierli

Yassierli juga mengapresiasi sikap serikat pekerja yang mengedepankan ruang dialog bermartabat dalam menyampaikan masukan terkait regulasi ketenagakerjaan.

"Mari kita sama-sama hadirkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang lebih baik, adil, dan memberikan kesejahteraan buat buruh di Indonesia. Tagline kita: maju industrinya, sejahtera pekerjaannya," pungkasnya. ● (Egi)



Resmi Jadi Menperin, M.Sarmuji Fokus Benahi Industri Sepatu & Tekstil

JAKARTA | Harian Merdeka

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendapatkan mandat untuk menyelesaikan persoalan industri padat karya setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober.

Sarmuji menilai, industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih besar.

Industri sepatu dan tekstil menjadi dua sektor yang secara khusus disebutkan sebagai fokus pembenahan.

"Saya dapat tugas yang barang kalicukup berat, misalnya (membenahi) industri sepatu,



industri tekstil. Karena sektor industri ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian. Tentu harus kami utamakan," ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, penguatan industri tidak dapat dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemperin) sendiri. Koordinasi lintas kementerian diperlukan, terutama dengan kementerian

yang berkaitan langsung dengan investasi, perdagangan dan kebijakan fiskal.

Dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemperin akan memperkuat sinergi dari sisi investasi dan pengembangan industri di sektor hulu.

Sementara dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), koordinasi akan diarahkan pada kebijakan impor, terutama untuk produk atau kebutuhan industri yang sebenarnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kami harus kerja sama dengan banyak kementerian yang lain," katanya.

Dari sisi fiskal, Politikus

Partai Golkar itu juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong pemberian insentif bagi sektor industri. Insentif tersebut dinilai diperlukan agar industri dapat berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.

"Kami harus minta insentif untuk industri, supaya tumbuh," terang Sarmuji.

Selain industri padat karya, Sarmuji menempatkan hilirisasi sebagai bagian penting dari agenda pengembangan industri. Menurut dia, penguatan industri memiliki keterkaitan erat dengan proses hilirisasi yang masih perlu dilanjutkan. ● (Egi)



Luky Alfirman Dicapot Purbaya, Kini Jadi Wamenkeu

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Luky dilantik bersama Nurkholisoh Ibnu Amman yang juga dipercaya menduduki posisi Wamenkeu. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Bagi Luky, pengangkatan tersebut menjadi momentum kembalinya ke lingkaran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setelah sebelumnya dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu pada April 2026.

Setelah dilantik, Luky langsung menyambangi kantor Kemenkeu. Ia mengaku memiliki perasaan campur aduk setelah kembali menjalankan tugas di kementerian tersebut.

"Kalau ditanya perasaan saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," kata Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Luky juga meminta dukungan jajaran Kemenkeu untuk mengejar berbagai pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Ia mengatakan, dirinya bersama Nurkholisoh tidak memiliki program khusus secara mandiri. Sebab, keduanya bertugas sebagai pembantu Presiden dan Menteri Keuangan. Menurut Luky, ada tiga fokus utama yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pertama, menyelesaikan pelaksanaan APBN 2026 yang memasuki tiga bulan terakhir tahun anggaran.

"Kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal tiga bulan lagi," ujarnya.

Fokus kedua, lanjut dia, mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Sedangkan fokus ketiga adalah melakukan konsolidasi internal guna mendorong reformasi dan transformasi di lingkungan Kemenkeu.

"Bagaimana kita juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi," kata Luky. ● (Egi)

Dudung Jadi Menko Polkam, Pengamat Royke Robeth : Perkuat Lingkaran Kepercayaan Prabowo



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10/2026).

Dudung menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2026.

Pengamat Politik FISIP Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Royke Roberth Siahainenia, menilai penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo, khususnya dalam sektor pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik.

Menurut Royke, Dudung bukan figur baru dalam pemerintahan Prabowo. Sebelum dipercaya menjadi Menko Polkam, Dudung pernah men-

duduki posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Ia dilantik sebagai KSP pada April 2026 menggantikan Muhammad Qodari.

"Penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo di sektor pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik," kata Royke.

Ia melihat rangkaian penugasan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kepercayaan politik dan administratif dari Prabowo kepada Dudung.

Posisi Menko Polkam sendiri memiliki peran strategis karena berkaitan dengan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga dalam bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, serta stabilitas nasional.

Dengan pengalaman Dudung sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan KSP, Royke menilai Dudung memiliki pengalaman

operasional sekaligus pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan.

"Pengalaman Dudung memimpin institusi militer besar serta bekerja dekat dengan presiden di KSP membuatnya memiliki modal operasional dan akses politik untuk menerjemahkan arahan Prabowo menjadi koordinasi lintas lembaga," ujarnya.

Namun, menurut Royke, posisi baru tersebut juga membawa sejumlah tantangan besar.

Pertama, Dudung dituntut menjaga stabilitas politik dan keamanan tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, hukum, serta hak-hak warga negara.

Kedua, ia harus mampu memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, kementerian terkait, dan lembaga intelijen agar kebijakan keamanan pemerintah berjalan secara terpadu.

Ketiga, Dudung harus mengelola berbagai isu pertahanan nasional dan dinamika keamanan domestik secara proporsional. ● (Agus)

Perintah Tegas Presiden Prabowo ke Kapolri Baru: Sikat Narkoba hingga Judol

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk memberantas peredaran narkoba dan judi online (judol). Perintah itu diungkapkan Jenderal Suyudi se usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi menyatakan, Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap penindakan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya narkoba dan judol. Selain itu, Prabowo juga mengingatkan jajaran Polri untuk memberantas penyelundupan.

“Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua ya terutama dalam berbagai kegiatan dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkoba, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” kata Suyudi.

Suyudi menegaskan akan segera konsolidasi internal Polri. Selain itu, Suyudi juga akan memetakan

berbagai persoalan di Korps Bhayangkara agar dapat menentukan langkah strategis berikutnya.

“Kita akan melaksanakan konsolidasi internal, kita akan melihat, kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting ya menjadi prioritas kami,” katanya.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menekankan pentingnya kehadiran Polri yang responsif dan mengedepankan pendekatan humanis kepada publik. Untuk itu, doktrin yang diusungnya dalam memimpin Polri adalah polisi bersama masyarakat.

“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka harkamtibmas,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Suyudi mengaku baru mendapat informasi dari pihak Istana untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon kapolri pada Kamis (1/10/2026)



pagi atau sesaat sebelum rapat di DPR. Setelah mendapat informasi tersebut, Suyudi segera mempersiapkan diri untuk menjalani fit and proper test.

“Oh belum, belum. Jadi kalau itu kami baru mendapatkan informasi tadi pagi. Sehingga kami langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan ya paparan proper test,” ungkap Suyudi.

Meski persiapannya terbilang singkat, ia mengaku telah menyiapkan konsep kepemimpinan Polri secara matang.

“Ya kami sudah punya konsep-konsep ya, ya tentunya tadi den-

gan waktu yang terbatas kami matangkan kembali,” imbuhnya.

Suyudi juga meluruskan kehadirannya di Istana pada Selasa (29/9/2026) sebelumnya bukan untuk membahas jabatan kapolri. Suyudi mengatakakan, rapat saat itu hanya membahas mengenai rehabilitasi narkoba dan kelebihan kepadatan lapas.

“Kami hadir di kegiatan tersebut tentunya untuk kegiatan rapat ya bersama dengan kementerian terkait, membicarakan terkait dengan rehabilitasi dan juga terkait edukasi,” tegasnya. ● (Egi)

Kemendagri Siap Kawal Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi pembicara kunci pada Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian



PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ribka mengatakan, keberlanjutan pembangunan membutuhkan konsistensi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Bahwa kon-

sistensi terhadap perencanaan itu sangat penting,” kata Ribka.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kemendagri secara konsisten menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu bersama Pemda dan kementerian/lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan gejala inflasi tidak menghambat proses pembangunan.

“Tujuannya untuk bagaimana kita menjaga inflasi daerah, kenaikan harga barang dan semuanya supaya ada pengendalian [yang] baik, sehingga seluruh proses-proses pembangunan ini dapat dilaksanakan di daerah,” ujarnya.

Selain inflasi, Kemendagri terus mengawal pertumbuhan

ekonomi daerah. Ribka menyampaikan, Mendagri telah membentuk tim untuk memantau pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan program dan intervensi pemerintah pusat dapat diimplementasikan di daerah.

“Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga kami di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah bentuk satu tim untuk terus mengikuti supaya semua program Asta Cita dari Bapak Presiden kita pada era transformasi ini terkait dengan masalah ekonomi dan semua program intervensi dari pemerintah pusat itu kemudian betul-betul diimplementasi di daerah,” jelasnya.

● (Egi)



KPK Sita Rp1 Miliar Lebih dan USD49 Ribu, Kasus Restitusi Pajak Banjarmasin Terus Didalami

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp1 miliar dan valuta asing senilai USD49 ribu dalam pengembangan perkara dugaan korupsi pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan dilakukan terhadap dua saksi yang diperiksa penyidik pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kedua saksi tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya bertugas di KPP Madya Banjarmasin, yakni Juventius Jaka Purwanto dan Sumargono.

“Penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah uang senilai Rp1 miliar lebih dan juga dalam bentuk valas senilai 49.000 US dolar,” kata Budi. Menurut Budi, penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Barang bukti yang diamankan juga akan digunakan dalam upaya pemulihan aset. “Penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ini tentu penting untuk proses pembuktian yang sedang berjalan. Serta, juga penting untuk langkah awal aset recovery,” ujarnya.

Dua Saksi Mangkir

Pada hari yang sama, KPK sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi. Namun, dua orang tidak hadir dan pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang.

Keduanya adalah Jul Septanta Tarigan, karyawan swasta yang disebut pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pajak PT Adaro Energy, serta Asih Setyo Kuncoro, pensiunan pegawai pajak. KPK sebelumnya menyebut Jul memiliki informasi terkait dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak. Karena itu, keterangannya dinilai penting untuk mengungkap aliran uang dalam perkara tersebut.

KPK Terbitkan Tiga Sprindik Baru

Pengembangan kasus ini semakin luas setelah KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Ketiga penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara, dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada tahap awal, ketiga sprindik tersebut masih bersifat umum sehingga belum seluruhnya menghasilkan tersangka baru. ● (Agus)

Kasus Gas Portable Gabriel Lumbantoruan di PN Jakut: Ahli Sebut Proses Hukum Cacat



JAKARTA |
Harian Merdeka

Sidang lanjutan perkara dugaan penyalahgunaan isi ulang gas portable dengan terdakwa Gabriel Lumbantoruan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (1 Oktober 2026). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. memaparkan 11 poin krusial yang menyoroti cacat prosedur dan kelemahan pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara isi ulang gas portable sebagai berikut:

Pertama, Ketidakabsahan Undercover Buy: Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya, metode pembelian terselubung (undercover buy) secara hukum hanya boleh diterapkan untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, bukan un-

tuk perkara UU Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Kedua, Penyalahgunaan Surat Perintah Undercover: Surat perintah undercover wajib digunakan sesuai peruntukannya. Jika surat perintah ditujukan untuk kasus prostitusi tetapi digunakan untuk perkara gas portable, maka alat bukti yang diperoleh masuk dalam kategori melawan hukum (exclusionary rule) dan harus dikesampingkan.

Ketiga, Wajib Uji Digital Forensik: Seluruh alat bukti elektronik berupa tangkapan layar (screen-shot) WhatsApp dan Facebook wajib melalui uji digital forensik untuk menjamin keabsahannya. Tanpa pengujian ini, bukti tersebut tidak boleh dipergunakan dalam perkara gas portable.

Keempat, Ketiadaan Uji Validitas Isi Gas: Terdakwa didakwa menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi. Ahli menegaskan harus ada uji khusus untuk membuktikan apakah isi gas portable tersebut identik dengan LPG 3 kg. Jika tidak dilakukan, maka unsur penyalahgunaan dalam Pasal 55 UU Migas

yang diubah Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi.

Kelima, Kualitas Saksi Testimonium De Audit: Keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (de auditu) hanya bisa dijadikan petunjuk dan tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti sah jika tidak didukung alat bukti lainnya.

Keenam, Pelanggaran Prinsip Ultimatum Remedium: UU Migas dan UU Metrologi Legal merupakan hukum administrasi bersanksi pidana. Berdasarkan prinsip ultimatum remedium, pelanggaran seharusnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian ESDM atau badan terkait untuk pembinaan dan sanksi administratif terlebih dahulu, bukan langsung dipidana.

Ketujuh, Keterangan Sidang Mengalahkan BAP: Jika terdapat perbedaan antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan persidangan, maka yang wajib digunakan adalah keterangan di muka sidang, sesuai dengan KUHP. ● (Egi)

Resmi Jabat KSP, Listyo Sigit Titip Pesan Khusus ke Kapolri Baru

JAKARTA |
Harian Merdeka

Usai menyerahkan tongkat komando kepemimpinan Korps Bhayangkara dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan pesan khusus kepada Kapolri baru, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Pesan tersebut disampaikan Listyo langsung kepada sukSESORNYA usai prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

“Tentunya kami titipkan kepada beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Listyo Sigit.

Listyo mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks, terutama di tengah dinamika situasi global saat ini.

“Apalagi, dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika

tantangan tugas juga semakin kompleks,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia mendorong Suyudi untuk terus mengawal peta jalan (roadmap) serta rencana strategis Polri jangka pendek hingga jangka panjang dengan berbagai terobosan inovasi.

“Tentunya Pak Suyudi juga memiliki program untuk terus bisa melanjutkan apa yang ada di dalam grand strategy tersebut, tentunya dengan inovasi beliau, dan tentunya saya mendukung penuh apa yang dikerjakan oleh beliau karena saya yakin bahwa beliau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk bisa memimpin institusi Polri tercinta ini,” tutur Listyo.

Listyo menambahkan dirinya sangat mengenal rekam jejak Suyudi lantaran pernah bertugas di wilayah penugasan yang sama.

“Saya mengenal beliau karena kebetulan kami pernah berkoordinasi di wilayah yang hampir sama. Namun, secara khusus, saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas serta



integritas,” ungkapnya.

“Jadi, saya ucapkan selamat kepada Pak Suyudi sebagai Kapolri yang baru. Kita doakan beliau untuk terus sukses dalam mengemban amanah sebagai pimpinan Polri,” tambah Listyo.

Merespons pesan tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang diberikan Listyo selama ini.

Suyudi menegaskan komitmen

menyanya untuk segera berkonsolidasi dan melanjutkan program penguatan pelayanan publik serta penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Listyo sendiri menegaskan dirinya belum pensiun sebagai anggota Polri. Dia kini merupakan jenderal polisi aktif yang memimpin KSP.

“Masih lanjut saja, kan pensiun saya masih 2027,” ujar Listyo. ● (Egi)

Aksi FSPMI di Banten Berjalan Kondusif, Kapolresta Serang Kawal



SERANG |
Harian Merdeka

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja dalam aksi penyampaian pendapat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, FSPMI meminta DPRD Provinsi Banten mengeluarkan rekomendasi

kepada DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Koordinator Lapangan FSPMI Erwin Supriadi mengatakan, pengesahan aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja.

“Langkah ini penting demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang layak bagi seluruh tenaga kerja di Banten maupun di selu-

ruh negeri,” kata Erwin.

Selain itu, FSPMI meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 ditetapkan naik pada kisaran 7,5 persen hingga 9 persen. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) untuk 2027.

Menurut Erwin, tuntutan tersebut disampaikan agar tingkat upah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dan perkembangan harga kebutuhan pokok.

FSPMI juga menyampaikan tuntutan terkait pajak Jaminan Hari Tua (JHT) 0 persen, menolak pesangon 0,5, serta meminta revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang

Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing.

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 sendiri mengatur jenis dan bidang pekerjaan alih daya, perjanjian alih daya, kewajiban perusahaan, serta perlindungan dan hak pekerja. Aturan tersebut berlaku sejak 30 April 2026.

Aspirasi tersebut kemudian disampaikan dalam audiensi antara massa FSPMI dengan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Audiensi turut dihadiri Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Wirasto Adi Nugroho, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, serta jajaran DPRD Provinsi Banten. ● (Egi)

GHEA YUBI JAJAL AKTING

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pedangdut Ghea Yubi mengambil langkah berani untuk melebarkan sayap ke dunia seni peran melalui serial drama Suara Hati. Debut akting perdananya itu menuntut pengorbanan besar, terutama terkait jadwal pertunjukan menyanyi di berbagai kota yang selama ini menjadi aktivitas utamanya.

Ghea Yubi dikenal memiliki agenda manggung off-air yang sangat padat setiap bulannya. Demi memprioritaskan komitmen jadwal syuting serial berdurasi panjang, ia terpaksa memangkas sebagian besar tawaran pentas menyanyi secara drastis hingga membuat pihak manajemen kerepotan.

"Ini manajer saya sampai pusing. Biasa sebulan 15 sampai 20 titik, sekarang cuma lima titik. Tapi ini salah satu pengorbanan aku dan keseriusan aku terjun di dunia akting," kata Ghea Yubi saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Pengurangan frekuensi penampilan panggung dilakukan lantaran proses produksi serial terus berjalan secara berkesinambungan dan berdurasi cukup panjang.

"Aku benar-benar excited banget, benar-benar happy banget. Jadi aku curahkan semua energi semuanya demi series ini," tuturnya.

Tawaran untuk beradu akting telah berulang kali menghampirinya. Namun, Ghea Yubi baru menerima tawaran kali ini karena konsep cerita drama yang disajikan dinilai selaras dengan latar belakang profesinya sebagai pedangdut.

Setelah merampungkan seluruh masa produksinya, pedangdut asal Bandung ini berencana mengambil masa rehat sejenak sebelum menerima proyek akting berikutnya.

"Untuk akting ketagihan, cuma mungkin karena banyak waktu dan energi yang cukup terkuras, jadi setelah ini aku akan istirahat dulu," pungkasnya. ● (sth)



Ini manajer saya sampai pusing. Biasa sebulan 15 sampai 20 titik, sekarang cuma lima titik. Tapi ini salah satu pengorbanan aku dan keseriusan aku terjun di dunia akting,"

Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan Budi



Pertamina Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Koperasi Desa Merah Putih, Distribusi Energi Diperkuat

JAKARTA |
Harian Merdeka

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satunya melalui penyaluran dan penguatan akses distribusi LPG 3 kilogram di tingkat desa dan kelurahan.

Hingga akhir September 2026, tercatat sebanyak 958 KDKMP di sejumlah wilayah Indonesia telah mendapatkan dukungan Pertamina Patra Niaga dalam akses maupun distribusi LPG 3 Kg.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi perusahaan dengan pemerintah untuk memperluas akses energi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

"Pertamina Patra Niaga mendukung Program

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," kata Kitty.

Menurut dia, ketersediaan LPG 3 Kg diharapkan dapat membantu KDKMP menjalankan fungsi distribusi energi kepada masyarakat. Pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan dukungan terhadap KDKMP dapat berjalan secara optimal.

Evaluasi Distribusi

Kitty menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan layanan distribusi bagi KDKMP yang telah siap beroperasi.

Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan layanan maupun penambahan outlet sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah.

"Pertamina Patra Niaga akan terus mendukung sesuai dengan peran dan kapasitas Pertamina Patra Niaga, khususnya dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat," ujarnya.

Dukungan terhadap KDKMP ini menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai distribusi energi hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan keterlibatan koperasi, akses masyarakat terhadap LPG 3 Kg diharapkan dapat semakin dekat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi lokal.

Untuk memperoleh informasi mengenai layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

● (Agus)

B50 Resmi Berlaku Penuh 1 Oktober 2026: Akhir Masa Transisi dan Langkah Nyata Swasembada Energi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Program mandatori biodiesel B50 resmi memasuki tahap implementasi penuh mulai 1 Oktober 2026. Berakhirnya masa transisi ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan energi nasional, sekaligus menandai langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Program tersebut sebelumnya mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, tetapi pemerintah memberikan masa relaksasi selama tiga bulan agar badan usaha dapat menghabiskan stok B40 sekaligus menyesuaikan fasilitas blending dan distribusi.

Memasuki 1 Oktober, masa transisi tersebut berakhir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menargetkan seluruh SPBU di Indonesia sudah menyalurkan B50 secara penuh.

6.050 SPBU Sudah Salurkan B50

Kesiapan implementasi nasional telah mengalami peningkatan signifikan. Hingga pertengahan September 2026, ESDM mencatat 6.050 dari total 6.412 SPBU, atau sekitar 94 persen, telah menyalurkan B50.

Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal juga telah menyalurkan B50, sementara 28 terminal lainnya masih dalam proses transisi dari B40 menuju B50.

Pemerintah juga memperketat spesifikasi biodiesel yang digunakan dalam B50 dibandingkan B40. Beberapa penyesuaian mencakup batas kandungan air dan persyaratan stabilitas oksidasi guna menjaga kualitas bahan bakar.

Pengawasan kualitas, prosedur penyimpanan, penanganan bahan bakar, hingga aspek teknis penggunaan B50 pada kendaraan turut diperkuat.

Bidik Penghematan Devisa Rp170 Triliun

Penerapan B50 tidak hanya diarahkan sebagai kebijakan energi terbarukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kebutuhan impor solar.

ESDM memproyeksikan B50 dapat menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026. Pemerintah juga menyebut kebutuhan CPO untuk program tersebut meningkat dari sekitar 15,2 juta ton pada skema B40 menjadi 16,3 juta ton.

Dari sisi tenaga kerja, pemerintah memperkirakan program B50 dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi sekitar 2,1 juta orang. Sementara potensi penurunan emisi gas rumah kaca diproyeksikan mencapai sekitar 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.

● (Agus)



Kunjungi Kejari Karangasem, Jamwas Rudi Margono Ingatkan Ubah Paradigma Kerja

KARANGASEM | **Harian Merdeka**

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., bersama Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono, SH. M.Hum dan tim melakukan Inspeksi Pimpinan di Kejaksaan Negeri Karangasem, Selasa (29/9). Tim disambut Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., bersama jajaran.

Inspeksi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, administrasi, kedisiplinan, penanganan perkara hingga pelayanan kepada masyarakat.

Di hadapan jajaran Kejari Karangasem, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., menegaskan seluruh bidang harus bekerja kolaboratif dan meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan serta laporan.

“Dalam pelaksanaan tugas, seluruh bidang di Kejaksaan harus membangun kolaborasi dan mengubah paradigma kerja dari sekadar kegiatan dan laporan menjadi hasil dan dampak nyata bagi institusi, negara, dan masyarakat, khususnya masyarakat Karangasem,” tegas Rudi.

Rudi juga menekankan fungsi pengawasan harus menjadi penggerak perbaikan kinerja, bukan sekadar penegakan disiplin.

“Peran pengawasan bukan hanya penegak disiplin, tetapi ikut mengakselerasi sekaligus memotivasi peningkatan kinerja di tiap-tiap bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., menyatakan Kejari Karangasem siap menindaklanjuti setiap arahan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan, keterbacaan administrasi, serta integritas setiap insan Adhyaksa,” kata Kusufi.

Dalam inspeksi tersebut, Kejari Karangasem memaparkan capaian kinerja 2025 hingga September 2026, tindak lanjut hasil pengawasan, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan serta berbagai persoalan aktual. Hasil inspeksi menjadi bahan evaluasi untuk memastikan perbaikan berjalan konkret dan kinerja Kejari Karangasem semakin berdampak bagi masyarakat. ● (Egi)



Kadispora Tangsel Mukroni Mundur, Ada Apa?

TANGSEL |
Harian Merdeka

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mukroni, mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut terjadi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten, yang membuat posisi pimpinan Dispora harus segera diisi agar agenda pemerintahan dan persiapan olahraga daerah tetap berjalan.

Untuk sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menunjuk H. Ika sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Tangsel.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie membenarkan kabar pengunduran diri Mukroni tersebut. Menurut Benyamin,

keputusan untuk mundur merupakan pilihan Mukroni dengan alasan pribadi.

“Alasan pribadi,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi wartawan Kamis (1/10/2026).

Dengan ditunjuknya H. Ika sebagai Plt, roda organisasi Dispora Tangsel tetap dapat berjalan di tengah agenda olahraga daerah yang cukup padat.

Pergantian sementara ini juga berlangsung ketika Tangsel tengah menghadapi persiapan menuju Porprov Banten.

Dispora menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam mendukung pembinaan olahraga, kepemudaan, serta koordinasi berbagai program olahraga di tingkat daerah.

Pemkot Tangsel kini perlu memastikan proses transisi kepemimpinan

di Dispora berlangsung lancar sehingga agenda yang telah disiapkan tidak terganggu.

Terutama, berbagai persiapan terkait kontingen Tangsel dalam menghadapi Porprov Banten diharapkan tetap berjalan sesuai jadwal meski terjadi perubahan di pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut.

Sementara itu, alasan pribadi yang disampaikan Mukroni menjadi dasar pengunduran dirinya.

Pemkot Tangsel belum menyampaikan lebih jauh mengenai langkah berikutnya terkait pengisian jabatan definitif Kepala Dispora.

Penunjukan H. Ika sebagai Plt untuk sementara menjadi langkah administratif Pemkot Tangsel agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di lingkungan Dispora. ● (Agus)

FWK Apresiasi Reshuffle Kabinet, Soroti Daya Beli dan Efektivitas Pemerintahan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Namun, FWK mengingatkan agar perombakan kabinet tersebut tidak berhenti pada pergantian pejabat. Reshuffle diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat realisasi program yang menjadi harapan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

"Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," ujar mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2021, Hendry Ch Bangun, dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Hendry, keberhasilan reshuffle pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pergantian pejabat, kata dia, perlu



diikuti dengan peningkatan pelayanan publik dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, FWK juga mengapresiasi pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

FWK berharap pergantian pucuk pimpinan Polri tidak sekadar menjadi pergantian kepemimpinan, tetapi diikuti peningkatan profesionalisme, kepercayaan publik, serta kuali-

tas pelayanan kepolisian.

Saat menjalani proses di DPR, Suyudi disebut menjanjikan penguatan pelayanan publik melalui program "Polisi Bersama Masyarakat".

Selain sektor kepolisian, diskusi FWK menyambut positif penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Arrmanatha menggantikan pejabat sebelumnya yang disebut memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo.

Arrmanatha Nasir memiliki pengalaman panjang di Kementerian Luar Negeri. Ia pernah

menjabat Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako dan UNESCO pada 2019-2021, serta Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2021-2024. Sejak 21 Oktober 2024, Arrmanatha ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Suyudi Ario Seto dan Arrmanatha Nasir merupakan bagian dari pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Dalam diskusi FWK yang dihadiri sejumlah wartawan senior, antara lain M Nasir, Yesayas Oktovianus dan Dr. Budi Nugraha, turut muncul sorotan terhadap banyaknya perwira tinggi Polri yang kini menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Mantan wartawan senior Kompas, Yesayas Oktovianus, menyampaikan hal tersebut dengan nada bergurau ketika menyinggung penunjukan Jenderal Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. **(hmi)**

KPK BAKAL

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Nusron Wahid dapat dilakukan penyidik apabila dibutuhkan untuk mengungkap rangkaian perkara, termasuk menelusuri peran sejumlah pihak swasta yang disebut memiliki kedekatan atau menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

"Ya tentunya penyidik terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Menteri, saudara NW," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (2/10/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan temuan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar.

KPK kini mendalami peran empat pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Keempatnya diketahui berada di luar struktur Kementerian

ATR/BPN, tetapi menurut KPK memiliki peran yang signifikan dalam rangkaian perkara.

"Terlebih dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ada empat orang kepercayaan yang merupakan pihak-pihak di luar struktur Kementerian ATR/BPN, tapi kemudian punya peran yang cukup signifikan dalam alur perintah ataupun alur penerimaan uang," ujar Budi.

Alur Perintah dan Aliran Dana Didalami

KPK tidak hanya mendalami siapa yang menerima uang, tetapi juga bagaimana perintah dalam perkara tersebut berjalan dan ke mana aliran uang mengalir.

Budi mengatakan, peran para pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan tersebut masih terus didalami penyidik, termasuk hubungan mereka dengan alur perintah dan penerimaan uang.

Selain itu, hasil pengeledahan di sejumlah ruangan pejabat Kementerian ATR/BPN juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap me-

iliki kapasitas serta pengetahuan terkait temuan penyidik.

KPK sebelumnya melakukan pengeledahan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal terkait, termasuk ruangan tiga direktur jenderal serta direktorat lainnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai perkara yang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah, tetapi juga dugaan aliran dana dan penerimaan lainnya. Delapan Orang Jadi Tersangka

OTT KPK pada 14 September 2026 kemudian berkembang menjadi penyidikan. Setelah mengantongi kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan sejak 15 September 2026.

Mereka adalah Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon

Agung Tbk.

Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Dalam pengembangan perkara, sejumlah nama dari pihak swasta tersebut disebut KPK memiliki hubungan sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Berawal dari Pengurusan HGB Summarecon

Kasus tersebut salah satunya berkaitan dengan pengurusan perpanjangan dan pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Tanah tersebut sebelumnya sempat mengalami sengketa dan pemblokiran.

KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan menteri agar blokir dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan. **(Agus)**

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks, menyebut laga melawan Bangladesh gila. Hal ini, Tim Garuda harus terus bikin gol hingga menit akhir akibat kejar-kejaran selisih gol dengan Malaysia.

Indonesia membantai Bangladesh 9-2 di Stadion Gelora Bung Karno pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Kamis (1/10/2026). Sembilan gol Indonesia lahir lewat lima gol Mitchell Baker, serta masing-masing satu gol dari Rizky Ridho, Luke

Vickery, Kevin Diks, Justin Hubner.

Bangladesh cuma bisa membalas dua gol lewat Farhaan Ali dan Mohammed Shahriar Emon. Laga ini begitu dramatis karena Indonesia kejar mengejar selisih gol dengan Malaysia untuk melaju ke final.

Malaysia

INDONESIA KE FINAL, DIKS: LAGA GILA!

pada laga terakhir Grup A juga menang besar atas Singapura 6-0. Namun, kemenangan tersebut gagal mengantarkan mereka ke laga puncak.

Poin dan selisih gol Indonesia sebenarnya sama dengan Malaysia yaitu empat angka dan punya selisih gol +9. Namun Tim Garuda yang jadi juara grup dan berhak ke final karena unggul produk-

tivitas gol. Tim Merah Putih mencetak total 11 gol di Grup A lebih produktif dua gol dari Malaysia yang bikin sembilan gol.

Perjuang Indonesia begitu luar biasa hingga menit terakhir di laga ini. Pasalnya tiga gol akhir pasukan John Herdman lahir di atas menit ke-90. Kapten Timnas Indonesia, Kevin Diks, menyebut laga melawan Bangladesh begitu gila.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA

aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

